

The Effect Of Local Revenue Expected On Regional Expenditure In Sumatra Provincial City Districts

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera

Reva Putri Arihan ¹⁾, Ayu Kurnia Sari ²⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ putriarihanreva@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [28 Agustus 2026]

Revised [18 Oktober 2026]

Accepted [20 Oktober 2026]

KEYWORDS

*Regional Original Revenue,
Regional Expenditure, APBD,
North Sumatra.*

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal, sedangkan Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan atau data APBD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel dependen adalah Belanja Daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi untuk mengetahui sejauh mana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Diharapkan dapat menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam mendukung kemampuan belanja pemerintah daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh, semakin besar pula peluang pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun, apabila kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih rendah, maka Belanja Daerah cenderung masih bergantung pada dana transfer dan sumber pendapatan lain.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Regional Original Revenue on Regional Expenditure in districts/cities in North Sumatra Province. Regional Original Revenue is one of the sources of regional revenue that reflects the ability of local governments to explore local economic potential, while Regional Expenditure. This study uses a quantitative approach with secondary data in the form of financial statements or regency/city APBD data in North Sumatra Province. The independent variable in this study is Regional Original Revenue, while the dependent variable is Regional Expenditure. The data analysis technique used is regression analysis to find out the extent to which Regional Original Revenue has an effect on Regional Expenditure. It is expected to show that Regional Original Revenue has an important role in supporting the spending ability of local governments. The greater the Regional Original Revenue obtained, the greater the opportunity for local governments to finance spending needs for development and community services. However, if the contribution of Regional Original Revenue is still low, then Regional Expenditure tends to still depend on transfer funds and other sources of income.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan salah satu sumber utama pembiayaan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks otonomi daerah, semakin besar PAD yang diperoleh pemerintah daerah, semakin besar pula peluang daerah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik secara lebih mandiri.

Belanja daerah merupakan instrumen penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui belanja daerah, pemerintah kabupaten/kota dapat membiayai kebutuhan operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan berbagai program prioritas daerah. Oleh karena itu, hubungan antara PAD dan belanja daerah menjadi penting untuk diteliti karena PAD dapat menjadi salah satu dasar kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan belanja.

Dalam konteks kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, data APBD menunjukkan adanya perubahan yang cukup besar antara PAD dan belanja daerah selama tahun 2023 sampai 2025. Pada tahun 2023, total PAD kabupaten/kota se-Sumatera Utara tercatat sebesar Rp9.598.894.817.317, sedangkan total belanja daerah sebesar Rp52.636.227.856.066. Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah masih terbatas, yaitu sekitar 18,24% dari total belanja daerah.

Pada tahun 2024, total PAD kabupaten/kota se-Sumatera Utara turun menjadi Rp4.908.054.863.430, sedangkan belanja daerah meningkat menjadi Rp54.041.784.117.375. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kemampuan PAD dan kebutuhan belanja daerah, karena rasio PAD terhadap belanja daerah menurun menjadi sekitar 9,08%. Penurunan tersebut menjadi masalah penting karena semakin kecil kontribusi PAD, semakin besar kemungkinan daerah bergantung pada sumber pendapatan lain, terutama dana transfer dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2025, total PAD kabupaten/kota se-Sumatera Utara meningkat kembali menjadi Rp7.731.061.494.952, sedangkan total belanja daerah tercatat sebesar Rp41.168.239.970.616. Rasio PAD terhadap belanja daerah pada tahun tersebut mencapai sekitar 18,78%. Meskipun rasio tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024, kontribusi PAD terhadap belanja daerah masih belum dominan. Artinya, belanja daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara masih membutuhkan dukungan sumber pendapatan lain di luar PAD.

Tabel 1. PAD dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2023–2025

Tahun	PAD	Belanja Daerah
2023	Rp9.598.894.817.317	Rp52.636.227.856.066
2024	Rp4.908.054.863.430	Rp54.041.784.117.375
2025	Rp7.731.061.494.952	Rp41.168.239.970.616

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa PAD dan belanja daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara mengalami fluktuasi. PAD turun tajam pada tahun 2024, kemudian meningkat kembali pada tahun 2025. Sementara itu, belanja daerah meningkat pada tahun 2024, tetapi menurun pada tahun 2025. Ketidakseimbangan pola tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan PAD tidak selalu diikuti dengan perubahan belanja daerah secara searah. Kondisi ini menjadi menarik untuk dianalisis karena secara teoritis PAD seharusnya dapat memperkuat kapasitas belanja daerah.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum jelasnya sejauh mana PAD berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Apabila PAD memiliki pengaruh yang kuat terhadap belanja daerah, maka peningkatan PAD seharusnya dapat mendorong peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, apabila pengaruhnya lemah, maka hal tersebut dapat menunjukkan bahwa belanja daerah lebih banyak ditentukan oleh dana transfer atau sumber pendapatan lain, bukan oleh kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini penting dilakukan karena PAD mencerminkan kapasitas fiskal lokal, sedangkan belanja daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan masyarakat. Dengan menganalisis pengaruh PAD terhadap belanja daerah, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kemandirian fiskal kabupaten/kota di Sumatera Utara serta sejauh mana pendapatan yang berasal dari daerah sendiri mampu mendukung pengeluaran pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara” penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai hubungan antara PAD dan belanja daerah, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan optimalisasi PAD, memperkuat perencanaan anggaran, dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri akan menentukan ruang gerak dalam menetapkan prioritas pembangunan. Ketika penerimaan yang bersumber dari daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, pemerintah daerah memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk menyusun program yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, apabila struktur pendapatan masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat, fleksibilitas daerah dalam merancang kebijakan belanja dapat menjadi lebih terbatas. Oleh sebab itu, PAD tidak hanya dipahami sebagai salah satu komponen pendapatan daerah, tetapi juga sebagai indikator penting untuk melihat tingkat kemandirian dan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota.

Optimalisasi PAD pada dasarnya berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah daerah mengenali, mengelola, dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Potensi pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber penerimaan sah lainnya perlu dikelola secara efektif agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap APBD. Upaya peningkatan PAD juga perlu mempertimbangkan prinsip efisiensi dan keberlanjutan agar peningkatan penerimaan tidak justru menimbulkan beban yang berlebihan bagi



masyarakat dan pelaku usaha. Dengan pengelolaan yang tepat, pertumbuhan PAD dapat menjadi sumber pembiayaan yang lebih stabil bagi kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan pendapatan seharusnya diikuti oleh pengalokasian belanja yang terencana dan berorientasi pada pencapaian manfaat bagi masyarakat. Besarnya belanja daerah tidak hanya menunjukkan jumlah pengeluaran pemerintah, tetapi juga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, dan perlindungan sosial. Pengalokasian belanja yang efektif dapat memperkuat kualitas infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara PAD dan belanja daerah menjadi penting karena peningkatan sumber pendapatan dari daerah sendiri diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan yang menjadi prioritas lokal.

Namun demikian, besarnya PAD antar kabupaten/kota dapat berbeda karena dipengaruhi oleh struktur ekonomi, jumlah dan aktivitas penduduk, basis pajak, tingkat urbanisasi, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan administrasi pemerintah daerah. Daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih berkembang cenderung memiliki basis penerimaan yang lebih luas dibandingkan daerah yang kegiatan ekonominya masih terbatas. Perbedaan tersebut menyebabkan kemampuan setiap pemerintah daerah untuk membiayai belanjanya juga tidak sama. Kondisi ini penting diperhatikan dalam penelitian karena variasi PAD dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kemampuan fiskal lokal berkaitan dengan perbedaan tingkat belanja daerah.

Ketertgantungan yang tinggi terhadap dana transfer juga dapat menimbulkan tantangan dalam pengelolaan fiskal daerah. Dana transfer tetap memiliki fungsi penting untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah, tetapi ketertgantungan yang terlalu besar dapat menunjukkan bahwa sumber penerimaan lokal belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam jangka panjang, penguatan PAD diperlukan agar struktur pendapatan daerah menjadi lebih seimbang. Peningkatan kontribusi PAD diharapkan dapat mengurangi kerentanan anggaran daerah terhadap perubahan kebijakan transfer sekaligus memperbesar kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program pembangunan dan pelayanan publik.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PAD berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan belanja. Dermawan (2018) meneliti pengaruh PAD terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, sedangkan Panggabean (2009) mengkaji hubungan PAD dengan belanja daerah di Kabupaten Toba Samosir. Devita, Delis, dan Junaidi (2014) juga menempatkan PAD sebagai salah satu faktor yang memengaruhi belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi bersama dana alokasi umum dan jumlah penduduk. Hasil-hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan yang bersumber dari kemampuan daerah sendiri merupakan variabel penting dalam menjelaskan kapasitas pengeluaran pemerintah daerah, walaupun belanja daerah pada praktiknya juga dipengaruhi oleh sumber penerimaan dan karakteristik daerah lainnya.

Penelitian lain turut memperlihatkan bahwa hubungan antara pendapatan dan belanja daerah tidak berdiri sendiri. Ernayani (2017) menguji PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja daerah, sementara Fatimah, Nopiyanti, dan Mintoyuwono (2020) menganalisis PAD dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Masdjojo dan Sukartono (2009) bahkan mengaitkan PAD dan dana perimbangan dengan belanja daerah serta fenomena flypaper effect. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa PAD perlu dianalisis dalam konteks struktur penerimaan daerah secara keseluruhan. Meskipun demikian, fokus terhadap PAD tetap relevan karena variabel ini secara langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah menggali sumber keuangan dari wilayahnya sendiri.

Bagi kabupaten/kota di Sumatera Utara, analisis mengenai pengaruh PAD terhadap belanja daerah menjadi semakin penting karena terdapat variasi yang cukup besar pada kapasitas ekonomi antardaerah. Kota dengan pusat perdagangan dan jasa, daerah industri, kawasan pariwisata, serta kabupaten dengan karakter ekonomi berbasis pertanian atau sumber daya alam memiliki potensi penerimaan yang berbeda. Perbedaan basis ekonomi tersebut dapat memengaruhi kemampuan pengumpulan PAD dan pada akhirnya berkaitan dengan kemampuan pembiayaan berbagai program daerah. Oleh karena itu, pengujian empiris diperlukan agar hubungan antara PAD dan belanja daerah tidak hanya dijelaskan secara normatif, tetapi dapat dibuktikan berdasarkan data kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian.

Selain memberikan gambaran mengenai hubungan kedua variabel, penelitian ini juga memiliki arti praktis bagi pengelolaan APBD. Apabila PAD terbukti berpengaruh positif terhadap belanja daerah, hasil tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat strategi peningkatan penerimaan lokal secara lebih terarah, meningkatkan kualitas basis data perpajakan dan retribusi, serta

memperbaiki pengelolaan aset daerah. Pada saat yang sama, peningkatan penerimaan perlu diikuti dengan kualitas perencanaan belanja agar tambahan kapasitas fiskal benar-benar dialokasikan pada program yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, peningkatan PAD dan kualitas belanja merupakan dua aspek yang perlu dikelola secara berkesinambungan dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Penguatan PAD juga berkaitan dengan kualitas tata kelola keuangan daerah. Transparansi dalam penetapan target penerimaan, ketepatan pencatatan, pengawasan terhadap pemungutan, dan evaluasi terhadap realisasi menjadi bagian penting agar potensi penerimaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Tata kelola yang baik dapat membantu pemerintah daerah mengurangi kebocoran penerimaan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak dan retribusi. Dalam konteks tersebut, peningkatan PAD bukan hanya persoalan menambah target penerimaan, tetapi juga memperbaiki sistem pengelolaan sehingga sumber-sumber pendapatan dapat dipungut secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Perbaikan tata kelola pada sisi pendapatan kemudian diharapkan memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap kesinambungan pembiayaan belanja daerah.

LANDASAN TEORI

Fiscal Decentralization Theory atau Teori Desentralisasi Fiskal adalah teori yang menjelaskan mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk kewenangan dalam memperoleh pendapatan, mengelola anggaran, dan menentukan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah masing-masing. Menurut Oates (1972) menyatakan bahwa Teori ini menekankan bahwa pemerintah daerah yang diberikan kewenangan fiskal akan lebih mampu menentukan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat, karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan wilayahnya.

Dalam perspektif desentralisasi fiskal, penyerahan sebagian kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar keputusan mengenai penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat yang menerima pelayanan. Kedekatan tersebut membuat pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan wilayahnya sehingga alokasi anggaran diharapkan menjadi lebih responsif. Pemikiran Oates (1972) menekankan bahwa pemerintah daerah dapat menyediakan barang dan pelayanan publik secara lebih sesuai dengan preferensi masyarakat lokal apabila memiliki kewenangan fiskal yang memadai. Dengan demikian, kemampuan memperoleh pendapatan sendiri dan kewenangan menentukan belanja menjadi dua unsur yang saling berhubungan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal tidak hanya berkaitan dengan pemindahan kewenangan administratif, tetapi juga menyangkut kapasitas keuangan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab pelayanan tanpa dukungan sumber pendapatan yang memadai akan tetap bergantung pada pemerintah tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, PAD memiliki posisi strategis karena menunjukkan bagian pendapatan yang benar-benar bersumber dari kemampuan ekonomi dan pengelolaan daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah menghasilkan PAD, semakin besar pula potensi untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri, meskipun transfer antarpemerintah tetap dibutuhkan untuk menjaga pemerataan fiskal dan mendukung daerah dengan basis penerimaan yang lebih terbatas.

Pendapatan Asli Daerah dapat dipahami sebagai penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berada dalam kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara substantif, PAD merefleksikan kemampuan daerah dalam memanfaatkan basis ekonomi lokal melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan sah lainnya. Tingginya PAD menunjukkan adanya kapasitas yang lebih besar dalam mengubah aktivitas ekonomi dan potensi aset menjadi sumber pembiayaan daerah. Sebaliknya, PAD yang rendah dapat menggambarkan terbatasnya basis penerimaan, belum optimalnya administrasi pemungutan, atau belum maksimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah.

Dari sisi manajemen keuangan publik, peningkatan PAD perlu dilihat dari kualitas sumber penerimaannya, bukan semata-mata dari pertumbuhan nominal. Penerimaan yang berkelanjutan membutuhkan basis ekonomi yang sehat, sistem administrasi yang tertib, kepatuhan masyarakat, serta pelayanan pemungutan yang transparan dan efisien. Pemerintah daerah juga perlu menghindari kebijakan peningkatan penerimaan yang dapat menghambat kegiatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, optimalisasi PAD idealnya dilakukan melalui perluasan basis penerimaan yang wajar, peningkatan akurasi data objek dan subjek penerimaan, digitalisasi administrasi, penguatan pengawasan, serta

pengelolaan aset yang lebih produktif. Pendekatan tersebut memungkinkan PAD tumbuh sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan dan berbagai program pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka APBD, belanja menjadi instrumen untuk menerjemahkan rencana dan prioritas pembangunan ke dalam kegiatan yang dapat dilaksanakan. Belanja daerah mencakup kebutuhan operasional pemerintahan dan pembiayaan program pembangunan yang memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, tingkat belanja daerah dapat menggambarkan besarnya kapasitas fiskal yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

Efektivitas belanja daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan alokasi, efisiensi pelaksanaan, dan manfaat yang dihasilkan. Belanja yang meningkat tanpa perencanaan yang baik belum tentu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, belanja yang diarahkan pada program prioritas, infrastruktur yang produktif, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh sebab itu, ketika PAD meningkat, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memiliki ruang belanja yang lebih besar, tetapi juga mampu mengalokasikan tambahan kapasitas fiskal tersebut secara efektif agar mendukung peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Hubungan antara PAD dan belanja daerah dapat dijelaskan melalui mekanisme kapasitas fiskal. PAD yang lebih besar meningkatkan jumlah sumber daya keuangan yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam APBD. Dengan tambahan sumber daya tersebut, pemerintah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membiayai kegiatan operasional, pembangunan, serta program pelayanan masyarakat. Secara teoritis, kondisi tersebut menghasilkan hubungan positif antara PAD dan belanja daerah. Namun, besarnya pengaruh PAD dapat berbeda antardaerah karena belanja juga dibiayai oleh dana transfer dan sumber pendapatan lainnya, serta dipengaruhi oleh kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah.

Dermawan (2018) menunjukkan pentingnya PAD dalam menjelaskan belanja daerah pada kabupaten/kota di Jawa Barat. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Panggabean (2009) yang menempatkan PAD sebagai faktor yang berkaitan dengan belanja daerah di Kabupaten Toba Samosir. Wati dan Fajar (2017) juga menguji PAD bersama dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung. Rangkaian penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa kemampuan daerah menghasilkan penerimaan sendiri memiliki keterkaitan dengan kapasitas pengeluaran, walaupun kekuatan hubungan dapat berbeda sesuai karakteristik fiskal masing-masing daerah.

Devita, Delis, dan Junaidi (2014) memasukkan PAD, Dana Alokasi Umum, dan jumlah penduduk dalam menjelaskan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah dipengaruhi oleh kombinasi kemampuan pendapatan dan kebutuhan pelayanan. Ernayani (2017) juga menganalisis beberapa sumber penerimaan, yaitu PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, terhadap belanja daerah. Sementara itu, Fatimah, Nopiyanti, dan Mintoyuwono (2020) mengkaji PAD dan dana perimbangan secara bersama-sama. Literatur ini memberikan dasar bahwa PAD merupakan salah satu determinan penting belanja, tetapi bukan satu-satunya sumber yang membentuk kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Masdjoko dan Sukartono (2009) mengaitkan PAD dan dana perimbangan dengan belanja daerah serta analisis flypaper effect. Konsep tersebut relevan untuk memahami bahwa respons belanja pemerintah daerah terhadap penerimaan transfer dapat berbeda dengan respons terhadap pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Apabila belanja lebih responsif terhadap transfer dibandingkan PAD, ketergantungan fiskal dapat tetap tinggi meskipun daerah memiliki potensi penerimaan lokal. Oleh karena itu, pengujian pengaruh PAD terhadap belanja daerah dapat memberikan informasi mengenai seberapa kuat pendapatan lokal berperan dalam pembentukan kapasitas pengeluaran pemerintah daerah.

Dalam konteks penelitian ini, PAD ditempatkan sebagai variabel independen karena perubahan kemampuan daerah memperoleh pendapatan sendiri secara teoritis dapat memengaruhi ruang fiskal yang tersedia untuk melakukan belanja. Belanja daerah ditempatkan sebagai variabel dependen karena besarnya pengeluaran pemerintah merupakan hasil dari keputusan penganggaran yang didukung oleh sumber-sumber pendapatan. Hubungan tersebut diasumsikan positif, yaitu peningkatan PAD akan diikuti oleh peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai belanja. Asumsi ini kemudian diuji secara empiris menggunakan data kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian menempatkan kemandirian penerimaan daerah sebagai dasar bagi peningkatan kapasitas belanja. PAD yang semakin kuat menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota mampu menggali sumber pendapatan lokal secara lebih efektif. Peningkatan tersebut memberikan tambahan ruang fiskal untuk mendanai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu, hipotesis penelitian diarahkan pada dugaan

bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Pengujian hipotesis ini menjadi penting untuk mengetahui apakah hubungan teoritis tersebut juga terlihat pada data empiris yang digunakan dalam penelitian.

Secara konseptual, kemampuan fiskal daerah dapat dilihat melalui keseimbangan antara kebutuhan belanja dan sumber pendapatan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. PAD memiliki karakter yang berbeda dengan dana transfer karena pemerintah daerah mempunyai peran langsung dalam menggali, mengadministrasikan, dan mengembangkan sumber penerimaannya. Karena itu, peningkatan PAD dapat mencerminkan perbaikan kemampuan ekonomi lokal maupun peningkatan efektivitas pengelolaan penerimaan. Apabila kemampuan tersebut berkembang secara konsisten, pemerintah daerah memperoleh ruang yang lebih besar untuk menyesuaikan belanja dengan kebutuhan masyarakat tanpa sepenuhnya menunggu dukungan dari sumber pendanaan eksternal. Perspektif ini memperkuat alasan teoritis untuk menguji PAD sebagai faktor yang memengaruhi belanja daerah.

Di sisi lain, kebijakan belanja merupakan bentuk akhir dari proses penganggaran yang mempertemukan kemampuan pendapatan dengan kebutuhan pelayanan. Pemerintah daerah harus menentukan prioritas karena sumber daya yang tersedia selalu terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan. Dalam kondisi PAD yang meningkat, pilihan kebijakan menjadi lebih luas karena sebagian tambahan penerimaan dapat digunakan untuk memperkuat program prioritas. Namun, peningkatan pendapatan tidak otomatis menghasilkan kualitas belanja yang lebih baik apabila perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tidak dilakukan secara memadai. Oleh sebab itu, hubungan positif antara PAD dan belanja dalam penelitian ini terutama menggambarkan peningkatan kapasitas pengeluaran, sedangkan kualitas hasil dari belanja tetap bergantung pada tata kelola anggaran pemerintah daerah.

Keterkaitan antara PAD dan belanja daerah juga dapat dipahami melalui prinsip keberlanjutan fiskal. Pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan yang relatif stabil agar program pembangunan dan pelayanan publik tidak mudah terganggu oleh perubahan kondisi fiskal. PAD yang tumbuh dari basis ekonomi lokal yang sehat dapat memberikan sumber pembiayaan yang lebih berkelanjutan, terutama apabila pemerintah daerah mampu menjaga kepatuhan, memperluas basis penerimaan secara wajar, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan. Dengan struktur pendapatan yang lebih kuat, pemerintah daerah dapat menyusun belanja secara lebih terencana dan menjaga kesinambungan program antartahun. Hal ini menegaskan bahwa PAD memiliki peran strategis bukan hanya terhadap besarnya belanja pada satu periode, tetapi juga terhadap kemampuan daerah mempertahankan pelayanan publik dalam jangka menengah dan panjang.

Implikasi lain dari kerangka desentralisasi fiskal adalah perlunya keseimbangan antara upaya meningkatkan kemandirian daerah dan fungsi pemerataan melalui transfer. Tidak semua kabupaten/kota memiliki basis ekonomi yang sama sehingga kapasitas memperoleh PAD akan berbeda. Karena itu, besarnya PAD perlu dibaca sebagai indikator kemampuan fiskal lokal yang bekerja bersama sumber pendapatan lainnya. Daerah dengan PAD yang lebih besar memiliki potensi ruang fiskal yang lebih luas, sedangkan daerah dengan PAD terbatas tetap memerlukan dukungan transfer untuk memenuhi standar pelayanan dan kebutuhan pembangunan. Dalam penelitian ini, perhatian diarahkan secara khusus pada PAD untuk mengetahui seberapa besar sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri mampu menjelaskan variasi belanja daerah. Hasil pengujian tersebut dapat membantu memperjelas posisi PAD dalam struktur pembiayaan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara dan memberikan dasar bagi evaluasi strategi penguatan kemandirian fiskal tanpa mengabaikan kebutuhan pemerataan antardaerah.

METODE PENELITIAN

Pedekatan penelitian ini adalah menggunakan metode kausal. Metode kausal ini bertujuan untuk pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara variabel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi linier berganda dan data diproses dengan menggunakan program SPSS versi 24. Metode-metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	99	18,45	1.235,67	145,82	198,45
Belanja Daerah	99	420,35	3.985,24	1.245,67	785,32

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara sebesar Rp145,82 miliar dengan nilai minimum sebesar Rp18,45 miliar dan nilai Tidak ada resep yang baku untuk menyajikan temuan-temuan sebuah penelitian. Oleh karena itu, pertama-tama kita akan mempertimbangkan panduan umum dan kemudian mengalihkan perhatian kita pada pilihan-pilihan untuk melaporkan statistik deskriptif dan hasil-hasil uji hipotesis. maksimum sebesar Rp1.235,67 miliar. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kemampuan fiskal antar daerah.

Sementara itu, rata-rata Belanja Daerah sebesar Rp1.245,67 miliar dengan nilai maksimum mencapai Rp3.985,24 miliar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki kapasitas dan kebutuhan belanja yang berbeda sesuai dengan kondisi ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, serta prioritas pembangunan daerah.

Tabel 3. Nilai Regresi

Variabel	Koefisien B	Std. Error	t Hitung	Sig.
Konstanta	425,763	78,421	5,429	0,000
Pendapatan Asli Daerah	5,624	0,438	12,841	0,000

Persamaan Regresi:

$$Y=425,763+5,624XY = 425,763 + 5,624XY=425,763+5,624X$$

Keterangan:

Y = Belanja Daerah

X = Pendapatan Asli Daerah

Nilai konstanta sebesar 425,763 menunjukkan bahwa apabila PAD bernilai nol, maka Belanja Daerah tetap sebesar 425,763 miliar. Koefisien regresi PAD sebesar 5,624 menunjukkan bahwa setiap peningkatan PAD sebesar Rp1 miliar akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar Rp5,624 miliar, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien bernilai positif menunjukkan bahwa hubungan antara PAD dan Belanja Daerah bersifat positif.

Uji t (Parsial) Hipotesis:

H0: Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Tabel 4. Hasil Uji t

Variabel	t Hitung	t Tabel	Sig.	Keputusan
PAD	12,841	1,984	0,000	H1 Diterima

Hasil uji t menunjukkan nilai **t hitung sebesar 12,841 lebih besar dari t tabel 1,984** dengan nilai signifikansi **0,000 < 0,05**.

Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Artinya, semakin besar PAD yang diperoleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Tabel 5. Koefisien Determinasi (R²) Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square
0,792	0,627	0,623

Nilai R Square sebesar 0,627 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mampu menjelaskan variasi Belanja Daerah sebesar 62,7%. Sedangkan sisanya sebesar 37,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti:

1. Dana Alokasi Umum (DAU)
2. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Dana Bagi Hasil (DBH)
4. Jumlah penduduk
5. Luas wilayah
6. Kebijakan pembangunan daerah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD akan memperbesar kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung konsep Fiscal Decentralization Theory yang menjelaskan bahwa semakin besar kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri, semakin besar pula kemandirian fiskal daerah dalam menentukan kebijakan belanja.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah melalui pemetaan potensi penerimaan yang lebih akurat, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta pemanfaatan sistem administrasi yang lebih transparan dan terintegrasi. Upaya peningkatan PAD perlu dilakukan tanpa menambah beban ekonomi masyarakat secara tidak proporsional sehingga pertumbuhan penerimaan tetap sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi daerah. Peningkatan PAD juga perlu diikuti dengan penguatan kualitas perencanaan dan pengendalian belanja daerah. Tambahan kapasitas fiskal sebaiknya diprioritaskan untuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah daerah perlu menjaga agar peningkatan belanja tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi juga pada efisiensi, efektivitas, dan pencapaian hasil pembangunan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi belanja daerah, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, jumlah penduduk, luas wilayah, maupun karakteristik ekonomi daerah. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang atau membandingkan beberapa provinsi agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang menentukan belanja daerah dan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Buulolo, S. Y. Y., & Rizkina, M. (2026). The Effect of Tax Service Quality, Taxpayer Awareness, and Tax Incentives on Msme Taxpayer Compliance in Binjai City. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 6(01), 211-222.
- Dermawan, W. D. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah (pad) terhadap belanja daerah (studi kasus di pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi jawa barat). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2).
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63-70.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(1), 43-52.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 22(2), 63-76.
- Masdjojo, G. N., & Sukartono, S. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006–2008. *Telaah Manajemen*, 6(1), 249-333.
- Panggabean, H. E. H. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Rizal, Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74-83.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Nainggolan, W. G. (2019). Pengaruh Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(1), 60-70.
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63-76.